

BAB II

BUDHI SARWONO DAN DINAMIKA SOSIAL POLITIK

BANJARNEGARA

2.1 Perjalanan Politik Budhi Sarwono

Budhi Sarwono merupakan Bupati terpilih Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022 yang dipanggil Wing Chin oleh warganya. Beliau pernah mencalonkan diri menjadi bupati Banjarnegara pada pilkada sebelumnya, namun gagal terpilih. Kemudian beliau terpilih menjadi bupati dengan pasangannya Syamsudin. Budhi dikenal sebagai pribadi yang cukup murah hati. Kegagalannya pada pilkada 2011 dijadikan pelajaran yang sangat berharga. Ia mengaku banyak belajar dari kesalahan masa lalu yang dirasanya kurang sempurna sehingga sempat kalah $\pm 4\%$ dari pasangan pemenang pada 2011 lalu. Meskipun hanya menang tipis dan memiliki kans yang cukup besar untuk memenangkan pilkada 2017, Budhi tidak lantas jumawa. Ia merombak strategi yang digunakannya pada 2011, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Banjarnegara agar dirasanya langsung tepat sasaran.

Sebagai sosok yang cukup terkenal di Banjarnegara, kesehariannya—sebelum menjadi bupati—banyak dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang konstruksi yang gemar menampung gelandangan dan pengemis. Bahkan akhir-akhir ini beliau diketahui memberikan minum orang dengan gangguan jiwa yang ditemuinya di tengah jalan. Orang dengan gangguan jiwa tersebut kemudian dikirimkannya ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo di Magelang.

Setelah mengalami perkembangan kesehatan yang cukup baik, kemudian tersebut dibawanya ke rumah dinas bupati untuk dipekerjakan sebagai perawat burung dan perawat tanaman. Aksinya ini membuat namanya kian dikenal sebagai sosok bupati yang dekat dengan rakyat kecil, tidak memandang apa latar belakang orang tersebut. Kedermawanannya terkenal hingga diliput beberapa media massa di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Banjarnegara jika Budhi merupakan sosok dermawan yang tidak *eman* memberikan bantuan.

Budhi juga menampung beberapa anak yang diketahui berjumlah delapan orang. Masing-masing dari mereka disekolahkan dan diberikan kehidupan yang layak. Beliau menganggap anak-anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Beberapa latar belakang anak-anak tersebut diantaranya adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya, anak yang lahir dari ibu dengan gangguan jiwa, serta anak dengan penyakit khusus. Bahkan salah satu anaknya pernah mengidap penyakit *hidrosefalus* yang bahkan dibawanya berobat hingga ke Singapura (Hartono, 2018). Menurutnya, berkat kebaikan yang diperbuatnya tersebut dapat mengikis jarak yang ada di tengah masyarakat antara kaum minoritas dan kaum mayoritas. Toleransi masyarakat Banjarnegara menjadi semakin kuat dalam rangka menghormati antar sesama. Kebaikannya tersebut juga menciptakan citra yang positif di tengah masyarakat sehingga mendukung *trust* yang terbentuk di tengah masyarakat. *Trust* tersebutlah yang menjadi cikal bakal munculnya modal sosial yang dimiliki oleh Budhi Sarwono sehingga memenangkan pilkada 2017 lalu. Sifat dermawannya memunculkan timbal balik dari masyarakat yang menganggap bahwa kemudian beliau patut

dipercaya untuk memimpin Banjarnegara. Timbal balik dari masyarakat ditujukan dalam rangka membalas Budi atas kebaikan yang dilakukan oleh calon bupatinya. Masyarakat juga memiliki kepercayaan bahwa Bupati mereka akan terus melanjutkan kebaikan yang sudah dilakukannya sejak jaman dahulu. Modal sosial yang terbentuk di tengah masyarakat kemudian dimanfaatkan sebagai modal politik dalam rangka mendukungnya pada pilkada. Modal sosial yang terbentuk memperkuat modal politik yang dimiliki beliau sehingga mempermudah jalannya dalam meraup suara yang cukup banyak bahkan mengalahkkn bupati petahana (*incumbent*). Sebagai pengusaha konstruksi, beliau juga diketahui memperbaiki beberapa jalan yang rusak. Dalam spot jalan yang diperbaikinya tersebut, beliau kemudian memasang baliho yang berisi foto dan namanya sendiri. Baliho tersebut dapat disebut sebagai alat peraga kampanye yang membantu memperkenalkan Budi Sarwono kepada calon pemilihnya. Ia mengakui, cara tersebut merupakan salah satu taktik dalam mengangkat namanya sehingga cukup dikenal oleh masyarakat tanpa perlu melakukan safari politik. Saat diwawancara, Ia mengaku awalnya hanya berniat untuk sekedar iseng saja, namun ternyata aksinya justru menjadi viral di kalangan masyarakat Banjarnegara.

Ya sedikit menghemat biaya kampanye lah, Dek. Saya mengakui saya awalnya melakukan itu (menaruh ikan dalalm jalan yang berlubang) hanya iseng saja biar viral gitu, lho. Jadi kan masyarakat langsung tersentil dan banyak yang memvideokan jadi sampe ke telinga pemda juga (wawancara dengan Budi Sarwono; 15 Oktober 2019)

Adanya protes dari masyarakat melalui persebaran video yang menayangkan jalan berlubang tersebut menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Banjarnegara pada saat itu. Sehingga saat

muncul sosok yang berjanji untuk memperbaiki infrastruktur langsung membangkitkan semangat masyarakat untuk menaruh kepercayaan mereka. Budhi membuktikan dengan melakukan perbaikan pada jalan berlubang tersebut pada masa kampanye, sehingga masyarakat melihat adanya keseriusan dalam dirinya.

Berbagai kebaikan-kebaikan yang dilakukannya dapat menjadi media pembentukan modal sosial yang bermanfaat dalam pencalonannya pada pilkada 2017 lalu. Seperti yang sudah dibahas di bab awal bahwa keberadaan modal sosial menjadi satu entitas yang cukup signifikan dalam menyumbang suara bagi kandidat. Dengan kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh beliau, maka *trust* akan terbentuk di tengah masyarakat karena merasakan langsung manfaat dari Budhi Sarwono. Selain itu, perbuatan positif yang dilakukannya juga membentuk habitus positif di tengah masyarakat. Habitus yang terbentuk juga pada akhirnya memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perolehan suara pada pilkada 2017 lalu. Seperti yang dijelaskan mengenai pengertian habitus, bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Budhi Sarwono dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar di tengah konteks masyarakat. Perbuatan yang dilakukannya tidak berdasar pada peraturan tertentu yang mewajibkannya untuk melakukan segala tindakan tersebut. Sehingga masyarakat memandang habitus yang dilakukan Budhi Sarwono sebagai suatu perbuatan positif yang memberikan dampak kepada masyarakat. Masyarakat juga menganggap bahwa segala yang dilakukannya merupakan tindakan yang tulus ingin memperbaiki Banjarnegara. Menurutnya, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menyebut setiap jalan raya yang bagus sebagai “*dalane Wing Chin*”.

Habitus yang dilakukan oleh Budhi Sarwono dikelompokkan dalam agenda ranah politik. Hal ini berarti bahwa seluruh perbuatan positif yang dilakukannya ditujukan dalam rangka memperebutkan sumber daya—kekuasaan sebagai Bupati Banjarnegara—dengan kandidat calon bupati lain pada pemilu 2017 lalu. Ranah politik menjadi medan perebutan sumberdaya tersebut sehingga dibutuhkan habitus dan modal yang dapat mendukung keberhasilan praktik sosial yang dilakukan oleh Budhi Sarwono. Seperti yang diketahui bahwa habitus, modal, dan ranah saling berbanding lurus dalam meningkatkan praktik sosial yang dilakukan oleh individu. Habitus dan modal yang dijalankan oleh seseorang dalam sebuah ranah yang tepat dapat menjadi formula yang tepat dalam mendukung strategi politik untuk mendapatkan tujuan politisnya.

Pria yang pernah menempuh pendidikan di SMA 1 Banjarnegara ini merupakan mantan Ketua Asosiasi PSSI Banjarnegara juga pernah menjabat sebagai Manajer Persibara, klub sepakbola asal Banjarnegara. Sementara sepak terjangnya sebagai pengusaha konstruksi membawanya menjadi Ketua Umum Asosiasi Aspal Beton Indonesia untuk regional Jawa Tengah. Sepak terjangnya dalam dunia olahraga dan usaha membuatnya cukup dikenal di kalangan sejawatnya. Sehingga keterkenalannya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menggaet calon pemilih agar memilihnya (wawancara dengan Budhi Sarwono; 15 Oktober 2019). Keterkenalan tokoh politik dapat dimanfaatkan sebagai *marketing* politik sehingga mengurangi tugas bagi kandidat untuk memperkenalkan diri di tengah masyarakat. Citra positif yang dibangun di tengah masyarakat juga mempermudah proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Budhi Sarwono.

Sosok Budhi Sarwono sebelum terjun dalam dunia politik, lebih dikenal sebagai pengusaha oleh masyarakat Banjarnegara. Perkenalan Budhi Sarwono pada dunia politik dimulai dengan pendekatan dari beberapa partai politik yang mengajaknya untuk turut serta membangun Banjarnegara. Pada saat itu, ia juga banyak diminta oleh partai politik untuk memberikan sumbangan sebagai langkah pendekatan untuk pencalonan sebagai kepala daerah. Hingga kemudian berlabuh menjadi anggota PPPI (Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia) sebagai bentuk strategi agar terhindar dari partai politik lain.

Pada tahun 2011 Budhi Sarwono memutuskan mengikuti pemilihan kepala daerah melalui jalur *independent* tetapi kalah dengan selisih kemenangan 4% dari suara tertinggi. Melalui wawancara (15 Oktober 2019.) yang dilakukan oleh penulis, Budhi Sarwono menjelaskan alasan-alasan mengapa ia kalah dalam pilkada 2011 antara lain adalah: tidak adanya mesin partai politik yang membantu; kurangnya modal ekonomi; serta kurangnya persiapan dalam menyiapkan strategi untuk lawan. Ketiadaan partai politik pendukung, membuatnya “dikeroyok” oleh seluruh partai politik di Banjarnegara. Kemudian ia mencoba *survive* dengan *money politic* meskipun kemudian tetap kalah. Sebagai seseorang yang terjun di dunia politik, menurutnya uang menjadi entitas yang harus diperhatikan saat pencalonan. Hal tersebut pula yang menjadi pertimbangan besar pada pencalonannya dalam pilkada 2017 ~~silam~~. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2017, Budhi bertekat untuk mengumpulkan modal ekonomi yang lebih baik untuk mengikuti pilkada 2017 lalu. Menurutnya, dengan modal ekonomi akan berbanding lurus dengan pilihan strategi yang

dapat diterapkan. Terbukti kemudian ia memenangkan kontes tersebut melawan dua kandidat lain—yang salah satunya merupakan petahana—

Selain itu, Budhi juga mendapat kekuatan modal sosial dari pasangannya. Syamsudin merupakan birokrat yang cukup terkenal namanya di Banjarnegara terutama di bidang pendidikan. Kendati baik Budhi maupun Syamsudin bukan merupakan tokoh politik, keduanya sama-sama pernah mengikuti pemilihan kepala daerah Banjarnegara tahun 2011 silam. Pada saat itu keduanya saling melawan satu sama lain, meskipun akhirnya sama-sama kalah. Kemudian keduanya memutuskan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 dengan tekad membawa Banjarnegara menjadi lebih baik. Sosok Syamsudin membantu modal sosial Budhi yang memang bukan pejabat public. Selain itu, sosok Syamsudin yang merupakan orang dengan pendidikan tinggi membantu elektabilitas Budhi yang memang hanya lulus sekolah setara SMA/SMK. Sehingga kombinasi keduanya menjadi kesatuan yang saling melengkapi.

2.2 Dinamika Sosial dan Politik Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan total penduduk pada 2017 berjumlah 912.917 (BPS Kabupaten Banjarnegara, n.d). Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang turut serta dalam proses pilkada serentak yang dilaksanakan pada 2017. Dalam kontes ini, terdapat tiga pasangan calon yang mencalonkan diri menjadi kandidat Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara, yakni: Hadi Supeno-Nur Heni Widiyanti, Wahyu Kristianto-Saeful Muzad, serta Budhi Sarwono-Syamsudin.

Tabel 2.1

Daftar Peserta Pilkada Banjarnegara 2017

No. Urut	Paslon	Partai pengusung	Kursi	Keterangan
1	Hadi Supeno-Nur Heni Widiyanti	PKB, Gerindra, Nasdem, PKS	15	-Non kader -petahana (wakil bupati)
2	Wahyu Kristianto-Saeful Muzad	PAN, PDIP	12	-Kader
3	Budhi Sarwono-Syamsudin	Partai Demokrat, Golkar, PPP	15	Non kader

Sumber: diolah dari <https://pilkada2017.kpu.go.id/paslon/tahapPenetapan>

Pilkada tersebut kemudian dimenangkan oleh pasangan Budhi Sarwono-Syamsudin, mengalahkan petahana Hadi Supeno yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati Banjarnegara periode 2011-2016 (Aziz, 2017). Peristiwa ini menjadi cukup menarik karena Budhi Sarwono dapat mengalahkan petahana yang pada masa pemerintahannya mendapat predikat kinerja kategori Sangat Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri dengan angka 3,1403 (Islahuddin & Paramita, 2017). Dinamika politik ini menjadi sangat menarik bagaimana kandidat pendatang dapat mengalahkan calon petahana yang justru mendapat perolehan suara terendah.

Pilkada Banjarnegara diikuti oleh total 779.379 pemilih dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 70% (Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017, n.d.). Angka ini berada di bawah target yang ditetapkan oleh KPU sebesar 77,5% (Maharddhika, 2016). Dinamika politik ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, seperti alasan pekerjaan, maupun ikatan emosional. Partisipasi

politik masyarakat tertinggi berada di Kecamatan Madukara dengan prosentase sebesar 79,1%. Sedangkan 19 kecamatan lain bervariasi berada di angka 60-77%. Komunikasi politik yang tepat sasaran dapat membawa dampak pada peningkatan partisipasi masyarakat saat pilkada tiba. Masyarakat yang sebelumnya acuh terhadap pilkada sebagai salah satu bentuk demokrasi, dapat terpengaruh menjadi kelompok masyarakat yang peduli terhadap siapa yang akan memimpin mereka selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Sesuai topografi Kabupaten Banjarnegara yang terletak di dataran tinggi, masyarakatnya kemudian banyak yang bekerja sebagai petani. Dahulu, kata Banjar menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah pertanian yang berpetak-petak (banjar) di sepanjang daerah aliran Sungai Serayu. Saat ini, mayoritas masyarakat Banjarnegara bekerja sebagai petani di kawasan dataran tinggi Dieng. Namun, yang mengejutkan justru adanya tren tingginya partisipasi masyarakat di kawasan petani dataran tinggi Dieng. Dua kecamatan yang memiliki partisipasi masyarakat dengan angka cukup tinggi yakni Kecamatan Wanayasa (77%), dan Kecamatan Batur (73,3) yang dua-duanya merupakan kecamatan di kawasan dataran tinggi. Berikut ini adalah tabel perolehan suara 20 kecamatan pada pilkada Banjarnegara 2017:

Table 2.2

Perolehan Suara pada Pilkada Banjarnegara Tahun 2017

No.	Kecamatan	Tingkat Partisipasi	Perolehan Suara Pasangan Calon berdasarkan Nomor Urut
1.	Banjarmangu	75,5%	1: 7627

No.	Kecamatan	Tingkat Partisipasi	Perolehan Suara Pasangan Calon berdasarkan Nomor Urut
			2: 5565 3: 12052
2.	Banjarnegara	75,7%	1: 10040 2: 9050 3: 18201
3.	Batur	73.3%	1: 5391 2: 7318 3: 6880
4.	Bawang	68,8%	1: 6430 2: 7307 3: 18.503
5.	Kalibening	68,8%	1: 6717 2: 6116 3: 10936
6.	Karangkobar	74,4%	1: 4136 2: 4506 3: 8286
7.	Madukara	79,1%	1: 5459 2: 7052 3: 13397
8.	Mandiraja	66,4%	1: 4654 2: 12360 3: 22380
9.	Pagedongan	66,3%	1: 5892 2: 3771 3: 11205
10.	Pagentan	71,3%	1: 3670 2: 5468 3: 11221
11.	Pandamarum	68,2%	1: 2451 2: 2354 3: 6977
12.	Pejawaran	77,8%	1: 5289 2: 9130 3: 10254
13.	Punggelan	65,2%	1: 7481 2: 7259 3: 27168
14.	Purwonegoro	64,4%	1: 4679 2: 8846 3: 27018
15.	Purworejo Klampok	66,1%	1: 3690 2: 4878 3: 15 198
16.	Rakit	68,5%	1: 5837

No.	Kecamatan	Tingkat Partisipasi	Perolehan Suara Pasangan Calon berdasarkan Nomor Urut
			2: 7356 3: 15096
17.	Sigaluh	74,8%	1: 2179 2: 4979 3: 10288
18.	Susukan	63,3%	1: 5436 2: 5819 3: 18497
19.	Wanadadi	70,6%	1: 3123 2: 4816 3: 10001
20.	Wanayasa	77,0%	1: 5491 2: 11202 3: 11431

Tabel 2.2 Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Banjarnegara 2017 (diolah dari laman KPU)

Keterangan:

1. Pasangan Hadi Supeno – Nur Heni Widayanti;
2. Pasangan Wahyu Kristianto – Saiful Muzad;
3. Pasangan Budhi Sarwono – Syamsudin.

Berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dapat dilihat jika pasangan BisSa memenangkan 19 kecamatan dari total 20 kecamatan di Banjarnegara. Kemenangan tersebut menjadi angka yang cukup mencengangkan, mengingat pasangan ini melawan salah satu petahana. Kemenangan ini dilatarbelakangi oleh penerapan strategi yang tepat yang disusun oleh tim pemenangan pasangan BisSa. Meskipun sebagian besar masyarakat Banjarnegara memiliki afiliasi politik dengan PAN dan PDIP, hal ini nyatanya tidak menjadi hambatan pasangan ini untuk memenangkan pilkada. Perlu diingat bahwa kepopuleran PAN dan PDIP di tengah masyarakat Banjarnegara masih cukup kuat. Sehingga persaingan politik pada pilkada 2017 tergolong cukup tinggi. Hal ini disebabkan akibat koalisi yang terbentuk antar pasangan calon memiliki basis yang hampir

sama rata. Persaingan politik terlihat sangat kuat pada masa itu. Masing-masing pasangan calon mengerahkan seluruh jajaran pengurus partai politik pendukung.

Selain memperhatikan peta kekuatan politik di Banjarnegara, tim kampanye juga mempertimbangkan sebaran agama. Sebaran agama yang cenderung homogen memudahkan praktik strategi politik yang dilakukan oleh para kandidat. Dengan agama Islam sebagai mayoritas, tim kampanye saling berebut menyusun strategi dengan menggaet tokoh agama yang dukungannya diyakini dapat mendongkrak suara kandidat. Banyaknya masyarakat yang masih mengantut Islam tradisional berbanding lurus dengan banyaknya masyarakat yang mengikuti *dhawuh* Kyai di daerahnya dalam menentukan pilihan politiknya. Hal ini menjadi perebutan yang cukup menarik karena pada saat itu PKB dan PPP yang dikenal banyak memiliki simpatisan Islam NU saling berlawanan. Sehingga masing-masing partai mengajak Kyai yang dilihat memiliki pandangan yang sama dengan pandangan partai untuk dimintai testimoni salah satu kandidat. Meskipun dominasi NU di Banjarnegara tidak terlalu signifikan, testimoni dari Kyai NU bagi masyarakat cukup diperhitungkan. Masyarakat muslim di Banjarnegara mayoritas memilih organisasi Sarekat Islam. Eksistensi SI di Banjarnegara dapat dilihat dari banyaknya sekolah-sekolah yang berdiri di bawah Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto. Yayasan pendidikan ini mendirikan sekolah dari jenjang TK hingga SMA, bahkan membentuk majelis taklim. Salah satu alasan mengapa organisasi ini cukup eksis di Banjarnegara adalah sikap netral dalam dunia politik. Kader SI dilarang membawa nama organisasi dalam melakukan politik praktis. Mereka dibebaskan untuk memberikan dukungan politik dengan garis

bawah atas nama perseorangan. Organisasi ini juga tidak pernah ikut campur dalam pencalonan kepala daerah. Sebaran agama ini memungkinkan Budhi untuk menarik simpati masyarakat karena ia termasuk ke dalam kelompok mayoritas. Sehingga pada praktik di lapangan, Budhi tidak mendapat kendala yang berarti meskipun ia berasal dari etnis minoritas.

Dalam praktiknya, tim kampanye juga memperhatikan kondisi geografis Banjarnegara yang terbagi menjadi dua, yakni kawasan atas dan bawah yang diakibatkan kondisi topografi juga membentuk strategi politik yang berbeda. Relasi antara kondisi geografi dengan dinamika politik dapat dilihat dari adanya istilah geografi politik yang merujuk pada cabang ilmu geografi manusia yang memiliki objek penelitian berupa tata ruang, pemerintahan, kenegaraan, hubungan lintas regional; lintas negara; serta lintas birokrasi atau pemerintahan (Budi & Muta'ali, 2015: 159) . Geografi politik menganalisis mengenai sebaran kekuatan sebuah negara berdasarkan kepemilikan sumber daya alam, pemilihan umum, dan kajian lain yang di dalamnya terjadi interaksi antara manusia dan lingkungan sekitar dalam lingkup politik (Wiranata et al., 2018: 278). Tylor dan Jhonston dalam (Budi & Muta'ali, 2015: 159-160) menjelaskan terdapat tiga gagasan utama dalam mempelajari geografi politik (*electoral geography*). *Pertama, Geography of Voting* yang menjelaskan pola sebaran perolehan suara pasca pemilihan dilakukan. Gagasan ini menggunakan metode statistika dalam menganalisis data yang diperoleh. *Kedua, The Geography Influences on Voting*, merupakan gagasan dalam studi geografi politik dimana terdapat empat aspek yang mempengaruhi proses pemilu. Aspek-aspek tersebut terdiri dari: isu yang tersebar saat proses pemilihan, proses pemilihan, efektivitas kampanye, serta

efek kedekatan dimana aspek ini berdasar pada relasi antara perolehan suara dengan tempat tinggal kandidat. *Ketiga, The Geography of Representation*. Gagasan ketiga ini merupakan gagasan yang menitikberatkan pada mekanisme pemilihan wakil rakyat yang akan menduduki parlemen. sehingga analisisnya dibagi berdasarkan jumlah pemilih serta daerah pemilihan (dapil).

Dalam *electoral geography*, jumlah perolehan suara dapat dianalisis berdasarkan aspek regional. Sehingga akan terlihat jelas pola pemilih yang berbeda pada kondisi geografis yang berbeda. Dalam gagasan *Geography Influences on Voting*, dijelaskan bahwa salah satu aspek geografi yang memiliki pengaruh terhadap perolehan suara adalah adanya kedekatan tempat tinggal kandidat dengan masyarakat. Pernyataan ini dapat didukung dengan temuan peneliti pada Tabel 2.1 dimana Budhi Sarwono yang beralamat di kecamatan Banjarnegara memperoleh lebih dari 18.000 suara. Selisih antara suaranya dengan suara yang lain bahkan mencapai 8.000 lebih. Hal ini dikarenakan semakin dekat tempat tinggal pemilih dengan kandidat yang dipilih maka akan semakin berpengaruh terhadap anggapan masyarakat. Dengan jarak tempat tinggal yang tidak terlampaui jauh, maka sedikit banyak masyarakat akan mengetahui tindak-tanduk dari kandidat yang akan dipilih.

Selain itu, *electoral geography* juga melihat aspek pendidikan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur tingkat kepedulian masyarakat melihat pasangan calon. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin selektif pula ia dalam memberikan dukungannya (Budi & Muta'ali, 2015: 164). Hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah menempuh pendidikan formal hingga jenjang tertentu akan mendapat pola pikir yang berbeda dengan

masyarakat dari tingkat pendidikan rendah. Sehingga mereka sudah bisa memutuskan apa yang harus dilakukan saat menerima berita simpang siur terkait dengan pemilihan. Pola pikir tersebut berbeda drastis dengan masyarakat dari golongan pendidikan rendah, dimana mereka cenderung menerima dan mengikuti perintah dari tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar. Masyarakat dari golongan pendidikan rendah juga cenderung lebih mudah dalam menerima kabar bohong atau hoax, sehingga menjadi celah bagi lawan politik untuk menyebarkan kampanye hitam dan/atau kampanye negatif.

Dinamika politik pada masa kampanye yang terbilang cukup panas menjadi salah satu hal yang cukup menarik. Mengingat salah satu calon bupati Banjarnegara berasal dari etnis minoritas, serangan kampanye hitam banyak terdengar. Dalam menyikapi hal tersebut, KPUD Banjarnegara terus menyerukan untuk para peserta dan pendukung agar menaati peraturan yang sudah ada. Dominasi kaum mayoritas pada pilkada serentak 2017 silam memang cukup kuat. DKI Jakarta sebagai salah satu peserta pilkada serentak 2017 sedikit banyak menyumbangkan alasan mengapa sensitifitas mayoritas terhadap minoritas meningkat. Sehingga, saat menghadapi lawan politik yang berasal dari etnis minoritas maka akan dicoba diserang dari sisi SARA. Meskipun hal tersebut tidak berhasil di Banjarnegara, namun pada prosesnya tetap meninggalkan jejak bagaimana pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin yang berasal dari minoritas.

Selain itu, persaingan menjadi cukup ketat karena Hadi Supeno merupakan wakil bupati petahana. Namun, karena pemerintah daerah Banjarnegara pada saat itu kurang memperhatikan masyarakat—di bidang

infrastruktur—kemudian menimbulkan konstruksi cara pandang yang kurang baik. Hal ini terlihat dari banyaknya jalan raya yang rusak di kawasan Banjarnegara. Bahkan hingga menjelang mudik lebaran tahun 2016, terdapat beberapa ruas jalan yang rusak (Novit, 2016). Fakta tersebut juga diakui oleh tiga informan perwakilan dari pemilih pada pemilihan kepala daerah Banjarnegara tahun 2017. Dalam proses wawancara, ketiga informan menyuarkan pendapat yang sama terkait kondisi jalan raya di Banjarnegara sebelum masa kepemimpinan Budhi Sarwono.

Kondisi tersebut yang dimanfaatkan oleh Budhi Sarwono sebagai habitus dari masyarakat Banjarnegara dalam praktik sosial untuk meraih kemenangannya. Kebutuhan masyarakat akan fasilitas jalan raya yang memadai dimanfaatkan olehnya melalui pemanfaatan modal yang dimilikinya, terutama modal ekonomi. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, Budhi dapat menjalankan strategi politiknya secara efektif dan efisien karena disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik di Banjarnegara.